



ANNUAL REPORT

PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN BERKELANJUTAN
UNTUK Mendukung PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PENURUNAN GAS RUMAH KACA

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2025



Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan	3
1. Detail Program/Proposal	4
2. Kemajuan Implementasi	4
2.1 Kinerja Program.....	4
2.2 Status Implementasi Keluaran Proyek	5
2.3 Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik	19
3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender	22
4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut.....	24
Lampiran	25

Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan

Implementasi program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun 2025 berfokus pada penguatan tata kelola hutan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) dengan Yayasan Penabulu. Salah satu pencapaian utama dalam penguatan kelembagaan adalah pelaksanaan patroli pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara intensif di enam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang meliputi Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrau, Maybrat, dan Sorong Selatan. Patroli ini berhasil mengidentifikasi berbagai gangguan hutan seperti indikasi pembalakan liar, perambahan lahan, hingga aktivitas tambang galian C ilegal, yang didukung penuh oleh pengadaan satu paket sarana prasarana patroli termasuk tujuh unit motor, drone, CCTV, hingga perangkat WiFi untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Dalam upaya meningkatkan tutupan hutan dan stok karbon, program ini telah merampungkan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 85 hektar di Kabupaten Maybrat, yang mencakup penanaman bibit pohon kehutanan seperti Armon dan Gaharu serta tanaman MPTS seperti Rambutan dan Mangga. Keberhasilan teknis ini dibarengi dengan monitoring lapangan yang ketat untuk memastikan kesesuaian jumlah bibit dan ketepatan waktu penanaman oleh mitra vendor. Selain itu, aspek partisipasi masyarakat diperkuat melalui distribusi 3.000 bibit kepada kelompok jemaat gereja di Kabupaten Sorong dan Maybrat, serta penyelenggaraan dua kali kampanye aksi mitigasi perubahan iklim yang melibatkan sekitar 500 partisipan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pada level kebijakan, langkah awal penyusunan dokumen Forest Reference Emission Level (FREL/FRL) telah diinisiasi melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas baseline emisi dan menjajaki peluang pendanaan iklim tingkat yurisdiksi. Sinergi program ini diperkuat dengan serangkaian kegiatan konsolidasi internal tim serta audiensi strategis bersama Gubernur Papua Barat Daya, yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara langsung dalam penanaman dan peningkatan kapasitas mereka demi menjamin keberlanjutan proyek. Meskipun secara keseluruhan implementasi pada kuartal ini berjalan lancar tanpa kendala berarti, rencana tindak lanjut akan diprioritaskan pada monitoring rutin tanaman RHL, kelanjutan penyusunan dokumen strategi REDD+, serta pemastian persetujuan seluruh rencana kerja oleh instansi terkait.

Proyek ini telah mencatat keterlibatan gender yang cukup baik dengan partisipasi perempuan sebesar 251 orang (34%) dari 746 orang total peserta, program ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip PADIATAPA/FPIC dalam interaksi dengan masyarakat. Walaupun terdapat keterlambatan akibat tantangan sinkronisasi jadwal dengan OPD dan penentuan lokus kegiatan yang memakan waktu, proyek ini telah berhasil membangun kerangka administratif yang solid untuk memastikan implementasi REDD+ yang lebih terarah dan akuntabel di masa mendatang.

Sorong, 16 Maret 2026

Penanggung Jawab Kegiatan
Yayasan Penabulu



EKO KOMARA

Mengetahui,
Penanggung Jawab
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat Daya



Julian Kelly Kambu, S.T., M.Si

1. Detail Program/Proposal

1. Proyek	<i>RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2</i>	
2. Kategori	Kategori II: Kinerja ER pada 2014-2016	
3. Pelaksana	Provinsi	Papua Barat Daya
	Nama Lemtara	Yayasan Penabulu
	Nomor Perjanjian	500.4/120/DLHKP-PBD/2025 259/PK/PENABULU/VII/2024/I
	Periode Program	(2025-2026)
4. Periode Pelaporan	Tahun 2025	
5. Judul Proposal	Penguatan Kelembagaan KPH dan Peningkatan Kapasitas Para Pihak untuk Memperkuat Tata Kelola Hutan di Papua Barat Daya	
6. Total Pendanaan Program/Kegiatan (Durasi Total)	(Rp) 17,593,542,920	
7. Total Dana yang Diajukan Tahun Berjalan (2025)	(Rp) 10.201.975.500	
8. Total Realisasi Dana Tahun Berjalan (2025)	(Rp) 5.862.275.635	

2. Kemajuan Implementasi

1 Kinerja Program

Berikut disajikan daftar pengisian “Outcome” proposal yang direfleksikan dengan “Output” dan “Outcome” Rencana Investasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya.

No. Outcome program/ proposal	Output Rencana Investasi RBP REDD+ GCF Output 2					Outcome Rencana Investasi RBP REDD+ GCF Output 2			
	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OM1	OM2	OM3	OM4
Outcome 1. Menguatnya Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Penguatan Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat	■	□	■	□	□	■	■	■	□
Outcome 2. Bertambahnya Tutupan Hutan dan Lahan yang Berkontribusi Kepada Peningkatan Stok Karbon di PBD	■	■	□	□	□	■	■	□	□
Outcome 3. Menguatnya Kebijakan Implementasi REDD+ dan NDC	□	□	□	■	■	□	□	■	■

2 Status Implementasi Keluaran Proyek

Implementasi proyek RBP REDD+ GCF output 2 di Provinsi Papua Barat Daya telah dimulai sejak tahun 2025 dan menunjukkan progres relatif baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya sebagai pelaksana utama dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai lembaga perantara. Kolaborasi ini menjadi pondasi penting dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan kerangka kerja *Result-Based Payment* (RBP).

Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan perkembangan positif. Meskipun tidak seluruh rencana awal dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana dan sebagian lainnya justru dilaksanakan lebih awal, kondisi ini merupakan bagian dari dinamika implementasi di tingkat tapak. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi capaian target utama. Sebagian besar kegiatan telah berhasil mencapai luaran yang direncanakan.

- Implementasi output 1.1, dalam rangka penguatan kelembagaan KPH telah dilaksanakan fungsi patroli pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 6 (enam) lokasi yang berbeda dan 1 (satu) kali paket pengadaan barang pendukung kegiatan patroli, berupa Motor 7 (tujuh) unit, Drone 1 (satu) unit, CCTV 8 (delapan) unit, Perangkat WIFI 4 unit, kamera 1 (satu) unit, infokus 2 (dua) unit, layar monitor 2 (dua) unit, Starlink mini 1 (satu) unit, Portable power station 3 (tiga) unit, pakaian dinas lapangan 30 (tiga puluh) set, handly talky 8 (delapan) unit, serta sepatu boots 30 (tiga puluh) pasang.
- Implementasi output 2.1, dalam rangka dukungan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta rehabilitasi area mangrove telah dilaksanakan 5 (lima) kali sosialisasi dan pengecekan lokasi penanaman, serta itu, telah disusun 8 dokumen rencana teknis (Rantek) sebagai dasar pelaksanaan. Selanjutnya telah dilaksanakan penanaman 53.132 bibit pohon pada area seluas 85 ha. Dalam mendukung keberhasilan proyek telah dilaksanakan 1 (satu) kali monitoring lapangan RHL. Sebagai bentuk dukungan RHL, telah dilaksanakan pengadaan tanaman kehutanan sebanyak 3.000 bibit pohon. Selain itu, telah dilaksanakan sosialisasi dan kampanye aksi penanaman pohon serta bersih lingkungan di Kabupaten Maybrat.
- Implementasi output 3.1 dalam rangka penguatan instrumen REDD+ Provinsi Papua Barat daya telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) membahas isu-isu strategis terkait implementasi REDD+. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta kebutuhan penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan RBP REDD+ provinsi Papua Barat Daya.
- Dalam rangka mendukung kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi RBP REDD+ Papua Barat Daya, telah dilaksanakan 2 (dua) konsolidasi, 1 (satu) kali audiensi dengan Gubernur Papua dan 1 (satu) kali supervisi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja, serta mengidentifikasi langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas implementasi RBP REDD+ di Provinsi Papua Barat Daya.

Berikut disajikan rincian kegiatan dan sub kegiatan RBP REDD+ di Provinsi Papua Barat Daya yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Oktober - Desember 2025:

Project Output	Project Activity	Indikator	Status	Implementation Progress (%)
1.1. Menguatnya Kelembagaan KPH	1.1.1. Patroli pengamanan dan pencegahan karhutla	Terlaksannya 2 priode kegiatan tambahan patroli dilaksanakan di 6 KPH ((KPH Unit I Raja Ampat, KPH Unit I Kota Sorong, KPH Unit III Sorong, KPH Unit IV Tambrauww, KPH Unit V Maybrat, KPH Unit VI Sorong Selatan)	On going	75%
	Kegiatan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilaksanakan di 6 wilayah pada tanggal 11-25 Desember 2025 yang difokuskan pada Kawasan yang memiliki potensi gangguan karhutla yang tinggi serta pengecekan penimbunan kayu. Kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan terhadap		Capaian output masih dalam proses. Pada tahun 2025 tercapai 6 kali patroli di 6 lokasi yang berbeda, dan 1 paket pengadaan barang pendukung kegiatan patroli. 53 papan Informasi direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.	

masyarakat terkait pencegahan pengamanan hutan dan karhutla. Kegiatan patroli yang dilaksanakan di 6 wilayah berikut antara lain, Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong Selatan menghasilkan inventarisasi jenis, ukuran, dan volume kayu pada Tempat Penimbunan Kayu (TPK) serta pada lokasi usaha kehutanan sebagai bahan pengendalian peredaran hasil hutan. Selain itu ditemukan indikasi aktivitas penebangan hutan illegal dan menjadi perhatian untuk dilakukan pengawasan. Temuan selama kegiatan patroli berlangsung telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya. Pengadaan barang mencakup sepeda motor sebanyak 7 unit, drone sebanyak 1 unit, baterai drone sebanyak 2 unit, CCTV sebanyak 8 unit, perangkat WiFi/Orbit sebanyak 4 unit, kamera sebanyak 1 unit, infokus sebanyak 2 unit, layar monitor sebanyak 2 unit, Starlink Mini sebanyak 1 unit, portable power station sebanyak 3 unit, pakaian dinas lapangan (PDL) sebanyak 30 potong, handy talky sebanyak 8 unit, serta sepatu boots sebanyak 30 pasang. dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan patroli fase kedua berjalan dengan lancar. Tingkat partisipasi Perempuan mencapai 17 % pada kegiatan patroli hutan lindung, setiap penyusunan tim patroli selalu memperhatikan keterwakilan gender sesuai dengan keahlian, kemampuan dan ketersediaan waktu patroli.	Tersedianya 1 paket barang untuk kegiatan patroli Tersedianya 53 plang/papan informasi yang terinstal di 4 KPH yaitu KPH Unit II Kota Sorong, KPH III Kabupaten Sorong, KPH V Kabupaten Maybrat, KPH VI Kabupaten Sorong Selatan
---	--



[Foto. Patroli karhutla Kabupaten Tambrau]

2.1. Dukun Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Area Mangrove	2.1.1. RHL Hutan dan lahan	Tersusunnya 4 dokumen rencana penanaman	On going	58%
	Aktivitas RHL hutan dan lahan didukung dengan 4 sub kegiatan, yaitu: 2.1.1.1. Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan, 2.1.1.2. Penanaman rehabilitasi hutan dan lahan, 2.1.1.3. Pelaksanaan monitoring lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 2.1.1.4. Pelaksanaan lapangan pemeliharaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (T+1) Kegiatan 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 telah dilaksanakan pada tahun 2025.	100 Ha hutan dan lahan di tanah mineral di 5 lokasi dilakukan rehabilitasi Terlaksananya 1 kali kegiatan monitoring penanaman Terlaksananya 1 kali periode kegiatan pemeliharaan lapangan untuk mendukung keberhasilan RHL hutan dan lahan	Capaian output masih dalam proses, pada tahun 2025 telah dilaksanakan 3 sub kegiatan sebesar 58% kegiatan dari keseluruhan kegiatan RHL hutan dan lahan.	
	2.1.1.1. Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan	5 Dokumen rencana penanaman	Tercapai	100%

Pra kondisi untuk rehabilitasi hutan dan lahan oleh Dinas Lingkungan Kehutanan dan Pertanahan telah dimulai pada tanggal 29 Agustus – 02 September 2025 dengan kunjungan lapangan/ground check calon lokasi 5 penanaman, yaitu Kampung Yumame, Kampung Insas, Kampung Aus Tiwit, Kampung Koma Koma, dan Kampung Isme, di Kabupaten Maybrat. Kegiatan ini dilakukan untuk memverifikasi areal RHL dan menjadi dasar penyusunan rancangan teknis RHL sebagai masukan terhadap proses persiapan, pengumpulan data sekunder dan rencana kerja termasuk jadwal, pembagian tim, dan logistik serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Sosialisasi RHL dan identifikasi calon petani dan calon lahan (CPCL) dilaksanakan sebelum <i>gound check</i> serta mendapatkan kesepakatan kegiatan RHL. Selanjutnya penyusunan 8 dokumen Rantek. Dan kegiatan RHL akan dilakukan di Kabupaten Maybrat seluas 85 ha, antara lain Pada Kampung Koma-Koma luasan RHL seluas 25 ha, Kampung Yumame seluas 10 ha, Kampung Aus Tiwit seluas 8 ha, Kampung Insas (Blok Insas I) seluas 8 ha, Kampung Insas (Blok Insas II) seluas 8 ha, Kampung Isme (Blok Isme I) seluas 10 ha, Kampung Isme (Blok Isme II) seluas 8 ha, dan Kampung Isme (Blok Isme III) seluas 8 ha. Partisipasi Perempuan mencapai 50 % pada kegiatan sosialisasi RHL dan <i>ground chek</i>, setiap penyusunan tim kerja selalu memperhatikan keterwakilan Perempuan. Pembagian kerja di lapangan berdasarkan keahlian, kemampuan dan ketersediaan waktu masing-masing.	Pada tahun 2025 capaian output masih dalam proses, sedangkan untuk capaian kegiatan telah dilakukan 5 kali sosialisasi dan pengecekan lokasi penanaman serta telah disusun 8 dokumen rantek
---	--



[Foto. Pertemuan dengan masyarakat di Kab. Maybrat]

2.1.1.2. Penanaman rehabilitasi hutan dan lahan	100 Ha	On going	85%
Penanaman yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya bersama mitra kerja perusahaan di Kabupaten Maybrat pada rentan waktu November – Desember 2025 dilakukan di 5 lokasi, antara lain: 1. Kampung Yumame (blok Yumame) distrik Aititiyo Raya seluas 10 ha yang dilakukan CV Baharar dengan tanaman Kehutanan (Armon) 4.375 batang, Gaharu 625 batang, Rambutan Okulasi 625 batang dan Mangga Okulasi 625 batang dengan total 6.250 bibit per hektar dengan jarak tanam 4 x 4 meter. 2. Kampung Isme (blok Isme I), Distrik Ayamaru Tengah, dengan luas 10 ha. Dengan tanaman kehutanan (Armon) sebanyak 4.375 batang, Gaharu sebanyak 625 batang, Rambutan Okulasi sebanyak 625 batang dan Mangga Okulasi sebanyak 625 batang dengan total 6.250 bibit per hektar dengan jarak tanam 4 x 4 meter (Cv Fun Maya) 3. Kampung Isme (blok II dan III) Distrik Ayamaru Tengah,		Capaian output masih dalam proses. Pada tahun 2025 tercapai penanaman 85 Ha (penyesuaian target kegiatan)	

	Kabupaten Maybrat dengan luas 16 ha. Penanaman dilakukan jumlah tanaman Kehutanan (Armon) sebanyak 7.000 batang, Gaharu sebanyak 1.000 batang, Rambutan Okulasi sebanyak 1.000 batang dan Mangga Okulasi sebanyak 1.000 batang dengan total 10.000 bibit per hektar dengan jarak tanam 4 x 4 meter. (CV Manuel Karya) 4. Kampung Aus Tiwit, Distrik Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat seluas 8 ha. Dengan Penanaman dilakukan jumlah tanaman Kehutanan (Armon) sebanyak 3.500 batang, Gaharu sebanyak 500 batang, Rambutan Okulasi sebanyak 500 batang dan Mangga Okulasi sebanyak 500 batang dengan total 5.000 bibit per hektar dengan jarak tanam 4 x 4 meter. (CV Rae Saa) 5. Kampung Koma-Koma, Distrik Ayamaru Selatan, dengan luas 25 ha. Dengan penanaman dilakukan jumlah tanaman Kehutanan (Armon) sebanyak 10.936 batang, Gaharu sebanyak 1.563 batang, Rambutan Okulasi sebanyak 1.563 batang, dan Mangga Okulasi sebanyak 1.563 batang dengan total 15.625 bibit per hektar dengan jarak tanam 4 x 4 meter. (CV Sami Jaya) 6. Kampung Insas (blok insas I dan II) dengan luas 16 ha. Dengan penanaman jumlah tanaman Kehutanan (Armon) sebanyak 4.376 batang, Gaharu sebanyak 626 batang, Rambutan sebanyak 1.563 batang dengan total 5.000 bibit per hektar dengan jarak tanam 4 x 4 meter (CV Sorin Mandiri). Secara keseluruhan total luasan penanaman mencapai 85 hektar. Selanjutnya akan dilaksanakan perawatan dan monitoring secara berkala untuk memastikan pertumbuhan tanaman dengan baik. Partisipasi Perempuan mencapai 25 % pada kegiatan penanaman di lahan hutan kritis. Pembagian tugas lapangan berdasarkan gender, laki-laki akan mengambil peran sebagai pengangkat bibit,		
--	--	--	--

pembuat luang sekaligus menanam, sedangkan Perempuan bertugas sebagai penanam dan penyedia makanan						
 [Foto. Proses penanaman di Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru]						
2.1.1.3. Pelaksanaan monitoring lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Kali kegiatan monitoring penanaman (hutan dan lahan)	<table><tr><td>On going</td><td>50%</td></tr><tr><td colspan="2">Capaian output masih dalam proses. Pada tahun 2025 tercapai 1 kali monitoring pemeriksaan hasil pekerjaan penanaman RHL, selanjutnya pelaksanaan monitoring direncanakan pada tahun berikutnya.</td></tr></table>	On going	50%	Capaian output masih dalam proses. Pada tahun 2025 tercapai 1 kali monitoring pemeriksaan hasil pekerjaan penanaman RHL, selanjutnya pelaksanaan monitoring direncanakan pada tahun berikutnya.	
On going	50%					
Capaian output masih dalam proses. Pada tahun 2025 tercapai 1 kali monitoring pemeriksaan hasil pekerjaan penanaman RHL, selanjutnya pelaksanaan monitoring direncanakan pada tahun berikutnya.						
Pada tanggal 12-15 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan pemeriksaan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya bersama Panabulu dan mitra pelaksana kegiatan terhadap hasil penanaman di 5 (lima) blok , yaitu Blok Koma-koma, Aus Tiwit, Isme, Insas, dan Yumame. Capaian pada kegiatan ini terverifikasinya kesesuaian jumlah dan jenis bibit tanaman yang digunakan oleh pihak penyedia (vendor), terpantau dan terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan penanaman dan/atau pemeliharaan tanaman secara tepat waktu, serta teridentifikasinya kondisi pertumbuhan tanaman pada masing-masing blok sebagai dasar evaluasi tingkat keberhasilan tumbuh tanaman. 40 % partisipasi Perempuan pada kegiatan monitoring kegiatan						

penanaman bibit, pembagian tugas berdasarkan jabatan fungsional dinas dan keahlian masing-masing. Selama ini tidak ada pembatasan akses berdasarkan jenis gender ketika melakukan monitoring di lapangan. Peran Perempuan sebagai tim monitoring dibutuhkan dalam melakukan komunikasi dengan Perempuan anggota kelompok Masyarakat. Kedepan perlu juga dilakukan perhitungan gender kepada jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan monitoring		
 [Foto. Dokumentasi kegiatan pemeriksaan hasil pekerjaan RHL oleh mitra pelaksana]		
2.1.3. Penghijauan lingkungan dan fasilitasi bibit tanaman untuk kelompok perhutanan sosial	Tersediannya 350 bibit tanaman kehutanan, 1000 bibit tanaman MPTS, 450 tanaman hias dan 12.000 mangrove untuk kegiatan penghijauan lingkungan dan aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kabupaten Sorong.	On going 40%
Dalam proses capaian kegiatan 2.1.3. Penghijauan lingkungan dan fasilitasi bibit tanaman untuk kelompok perhutanan sosial didukung dengan 3 sub kegiatan, (2.1.3.1) Pengadaan bibit tanaman kehutanan, MPTS dan mangrove untuk penghijauan lingkungan, (2.1.3.2) Fasilitasi Bantuan Bibit Tanaman untuk Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial dan (2.1.3.3) Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kabupaten Sorong. Pada tahun telah dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu (2.1.3.1) Pengadaan bibit tanaman kehutanan, MPTS dan mangrove untuk penghijauan lingkungan, (2.1.3.3) Sosialisasi dan	Tersediannya sekurang-kurangnya 7.608 bibit (kayu dan MPTS) untuk kelompok perhutanan sosial Terlaksananya 2 kali kegiatan aksi kampanye penanaman pohon	Capaian output masih dalam proses, pada tahun 2025 telah tercapai 40% kegiatan dari seluruh kegiatan 2.1.3. Dan akan diselesaikan di tahun berikutnya.

kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kabupaten Sorong. Sedangkan sub kegiatan (2.1.3.2) Fasilitasi Bantuan Bibit Tanaman untuk Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.			
2.1.3.1. Pengadaan bibit tanaman kehutanan, MPTS dan mangrove untuk penghijauan lingkungan	Tersediannya 350 bibit tanaman kehutanan, 1000 bibit tanaman MPTS, 450 tanaman hias dan 12.000 mangrove	On going	21 %
Pada tanggal 17-18 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan terkait pengadaan bibit pohon, dilakukan untuk memastikan kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan pemeriksaan bibit yang diadakan terdiri dari gaharu sebanyak 175 batang dan matoa sebanyak 175 batang, tanaman MPTS berupa rambutan okulasi dan mangga okulasi sebanyak 2.200 batang, serta tanaman hias berupa pucuk merah sebanyak 450 batang. Pendistribusian bibit sebanyak 2.998 bibit dilakukan pada tanggal 14-16 November 2025 di wilayah pelayanan Klasik GKI Kabupaten Maybrat dan Klasik GKI Kabupaten Sorong. Partisipasi Perempuan mencapai 29 % terdiri dari unsur ASN, Jamaat Gereja dan kelompok Masyarakat pada kegiatan pengadaan bibit, pengecekan dan distribusi bibit tanaman		Capaian output masih dalam proses, sedangkan untuk capaian kegiatan telah dilakukan 1 kali pengadaan bibit untuk penghijauan sebanyak 3.000 batang	



[Foto. Pendistribusian bibit ke Klasis GKI Kab. Sorong]

2.1.3.2. Fasilitasi Bantuan Bibit Tanaman untuk Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial	Tersedianya sekurang-kurangnya 7.608 bibit (kayu dan MPTS) untuk kelompok perhutanan sosial	Tertunda	0%
Masuk dalam rencana kerja tahun 2025 dengan target 7.608 bibit tetapi belum terlaksana.		Kegiatan tertunda pada tahun 2025, selanjutnya pelaksanaan direncanakan pada tahun berikutnya	
2.1.3.3. Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kabupaten Sorong	1 kali kegiatan Kampanye Lingkungan Gerakan Aksi Perubahan (Ampi) Mitigasi Iklim	Tercapai	100%
Pada tanggal 14-15 November 2025 telah dilaksanakan sosialisasi dan kampanye aksi penanaman pohon serta bersih lingkungan di Kabupaten Maybrat dengan partisipan 200 orang. Pada 10 Desember 2025 Kabupaten Sorong dengan partisipan 300 orang.		Capaian output masih dalam proses, sedangkan untuk target aktivitas telah tercapai 2 dari 2 kali proses sosialisasi telah dilakukan di Kab. Sorong dan Kab. Maybrat	
Materi yang disampaikan di Kabupaten Maybrat, materi meliputi dampak perubahan iklim terhadap Kabupaten Maybrat yang disampaikan oleh perwakilan Dinas LHK Provinsi Papua Barat Daya, peran gereja dan perempuan dalam mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan oleh GKI Sion Kampung Koma Koma, serta pengenalan perhutanan sosial yang disampaikan oleh perwakilan Balai Perhutanan Sosial Ambon, Kepala Seksi Wilayah III Papua Barat Daya, dan materi terkait			

	kesadaran lingkungan dan Perpres yang berkaitan dengan NEK oleh perwakilan DPD RI dapil PBD. Sementara itu, pada kegiatan di Kabupaten Sorong, materi yang disampaikan meliputi isu hutan adat dan perubahan iklim oleh Dinas LHK Provinsi Papua Barat Daya, serta materi terkait perhitungan emisi Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) yang disampaikan oleh Direktorat IGRK Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pendeta Klasik Malamoi menyampaikan bagaimana kebijakan lingkungan yang harus memihak kepada umat dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam kegiatan ini juga 3.000 bibit dibagikan bagi kelompok gereja yang terdiri atas bibit kehutanan, MPTS, dan tanaman hias. Pertisipasi perempuan mencapai 35% terdiri dari unsur ASN, Jamaat gereja, kelompok masyarakat pada kegiatan sosialisasi dan kampanye aksi penanaman. Utusan peserta diserahkan kepada aturan main kelompok masyarakat dan kehadiran di gereja merupakan inisiatif personal untuk hadir dalam rangka ibadah		
	 [Foto. Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan]		
3.1. Penguatan Instrumen REDD	3.1.1. Penyusunan Strategi-rencana aksi dan FRL/FREL REDD+ Provinsi PBD termasuk NCB (Biodiversity) Kegiatan Penyusunan Strategi-rencana aksi dan FRL/FREL REDD+ Provinsi PBD termasuk	1 Dokumen FRL/FREL termasuk NCB (Biodiversity) 1 draft Dokumen Strategi-rencana aksi REDD+	On going 50% Capaian output masih dalam tahap proses, pada tahun 2025 aktivitas 3.1.1 sudah mencapai 50% dari target kegiatan.

+ Prov PBD	NCB (Biodiversity) didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu kegiatan 3.1.1.1 Penyusunan Dokumen Forest Reference Level/Forest Reference Emission Level (FRL/FREL) termasuk Non Carbon Benefit (NCB) yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan kegiatan 3.1.1.2 Konsultasi Publik Rencana Strategis dan aksi REDD+ PBD yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya			
	3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Forest Reference Emission Level (FRL/FREL) termasuk Non Carbon Benefit (NCB)	Draf Laporan penyusunan FRL/FREL dan NCB	Tercapai	100%
	Pada tanggal 27 Oktober 2025 telah dilaksanakan kegiatan FRL/FREL diawali melalui kegiatan FGD yang membahas isu-isu terkait RBP REDD+ output 2 secara hybrid yang mencakup metode perhitungan karbon (<i>Art Trees</i>). Hasil dari FGD ini yaitu keberhasilan inisiatif pendanaan iklim di tingkat yuridiksi sangat ditentukan oleh komitmen dan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan daerah. Serta mendorong peranan pemerintah dalam menjaga tutupan hutan.		Capaian output masih dalam progres, sedangkan untuk kegiatan masih dalam tahapan awal, dengan 1 kali kegiatan FGD, belum tercapai draft laporan FRL/FREL	
 [Foto. FGD membahas isu-isu terkait REDD+ serta pemahaman mengenai REDD+ dan perubahan iklim]				
Kegiat an	Monev Program RBP Papua Barat Daya	Terlaksananya monitoring dan	On going	20%

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program RBP di Papua Barat Daya dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kegiatan di lapangan dilaksanakan 5 kali dalam 1 periode.	evaluasi program dan safeguard per kuartal, dan final evaluasi	Pada tahun 2025 tercapai 1 kali aktivitas Monev yang dilaksanakan pada Q3 dan Q4 tahun 2025		
	Monev Program RBP Papua Barat Daya	2 kali monev program dan safeguard	Tercapai	100%
	Monev dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, anatara lain: Pada tanggal 24-27 September 2025 telah dilaksanakan kegiatan konsolidasi dan persiapan Pelaksanaan RBP REDD+ GCF Output 2, yang dihadiri tim Yayasan Penabulu tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi. Kegiatan ini membahas pengenalan SOP, tata Kelola proyek, administrative, keuangan, dan safeguard. Dilakukan juga penyusunan rencana kerja semesteran dan triwulan tiap daerah. Pada tanggal 6-10 Oktober 2025 telah dilaksanakan kegiatan konsolidasi penguatan kapasitas teknis pengelolaan proyek RBP. Pada tanggal 20 – 24 Oktober 2025 telah dilaksanakan kegiatan konsolidasi dengan tujuan meningkatkan pemahaman tim secara menyeluruh terkait system dan mekanisme kegiatan. Pada tanggal 2-8 November 2025 telah dilaksanakan Audiensi dengan Gubernur Papua Barat Daya, dan Koordinasi Internal Tim pada proyek RBP REDD+ GCF output 2 di Provinsi Papua Barat Daya, yang bertujuan untuk <i>refreshment</i> tim terkait pengelolaan tm pelaksana dan memperkuat koordinasi keuangan. Dan pentingnya masyarakat Dalam keberhasilan proyek. Pada tanggal 7-11 Desember 2025 telah dilaksanakan supervisi dan monitoring kegiatan di proyek RBP REDD+ GCF output 2 Provinsi Papua Barat Daya dengan tujuan koordinasi intensif mengenai pengelolaan anqgaran,	Pada tahun 2025 tercapai 2 kali konsolidasi, 1 kali audiensi dengan Gubernur Papua Barat Daya, dan 1 kali supervisi		

	evaluasi kinerja mingguan, dan penyelarasan administrasi dengan instansi pemerintah setempat. Serta serah terima kendaraan operasional pengawasan hutan. Dan tim ikut serta dalam penyelenggaraan sosialisasi mitigasi perubahan iklim dan penghijauan di Kabupaten Sorong.		
	 [Foto. Audiensi dengan Gubernur Papua Barat Daya]		

Berikut disampaikan perkembangan terbaru mengenai indikator dampak berdasarkan *logical framework* proyek RBP REDD+ Output 2 Provinsi Papua Barat Daya.

Outcome	Indikator Outcome	Baseline	Means of Verification (MoV)	Capaian saat ini	Target (Mid-term)	Target (Final)
Outcome 1. Menguatnya Pengelolaan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kelembagaan KPH yang menguat dalam mengelola wilayah kerja KPH	RKPS persetujuan PS di Provinsi Papua Barat Daya per Juni 2024 3 memiliki RKPS, 9 memiliki draft RKPS dan 13 LPHD/KTH belum memiliki RKPS	List MOV: • Dokumen RKPS • Laporan kegiatan pelatihan KPH dan Kelompok masyarakat • Laporan kegiatan patroli • Laporan kegiatan monitoring	Pada 2025, patroli di 6 lokasi terlaksana dan pengadaan barang sebagian selesai, sementara pemasangan papan informasi masih direncanakan.	0	Terwujudnya tata kelola hutan lestari seluas 2.392.184,32 hektar di wilayah kerja 6 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Outcome 2. Bertambahnya Tutupan Hutan dan Lahan yang Berkontribusi	Luasan rehabilitasi hutan dan lahan mineral serta	378 Ha telah direhabilitasi di tahun 2023 di 8	List MOV: • Laporan Kegiatan/Program	Pada 2025, sosialisasi, pengecekan lokasi, penanaman 85 Ha, monitoring	0	Bertambahnya 100 Ha area (RHL) dan 20 Ha (mangrove) yang berkontribusi terhadap peningkatan

Kepada Peningkatan Stok Karbon di Provinsi Papua Barat Daya	mangrove yang dilakukan dan mangrove ditanam untuk penghijauan lingkungan	desa di 3 kota Sorong, Kab. Sorong dan Sorong Selatan	• Berita acara pelaksanaan kegiatan	RHL, pengadaan bibit, dan sosialisasi di Kab. Sorong dan Maybrat telah dilakukan, namun capaian output sebagian masih dalam proses dan akan dilanjutkan tahun berikutnya.		stok karbon provinsi Papua Barat Daya
Outcome 3. Menguatnya Kebijakan REDD+ dan Implementasi NDC	Menguatnya kebijakan REDD+ dan Implementasi NDC di Papua Barat Daya yang didukung adanya Dokumen Strategi - Rencana Aksi dan FRL/FREL termasuk NCB (Biodiversity) serta implementasi Proklamasi	Belum tersedia dokumen FREL, pelaporan safeguard dan inventarisasi GRK	List MOV: • Laporan kegiatan • Laporan inventarisasi dan safeguard • Laporan Forest Reference Level FREL	Pada 2025, kegiatan FGD telah dilakukan sekali, namun draft laporan FRL/FREL belum tercapai dan capaian output masih dalam progres.	0	Menguatnya kebijakan REDD+ dan Implementasi NDC di Papua Barat Daya yang didukung adanya Dokumen Strategi - Rencana Aksi dan FRL/FREL termasuk NCB (Biodiversity) serta implementasi Proklamasi
Supporting Program. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RBP REDD+ PBD	Jumlah monitoring dan evaluasi progra, dan safeguard per kuartal, dan final evaluasi		List MOV: • Laporan kegiatan • Dokumentasi	Pada tahun 2025 tercapai 2 kali konsolidasi, 1 kali audiensi dengan Gubernur Papua Barat Daya, dan 1 kali supervisi.	3 Kali laporan monitoring 4 Kali laporan monitoring 1 Final evaluasi	7 Kali laporan monitoring dan 1 Final evaluasi

3 Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik

Pelaksanaan Proyek RBP GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya telah berjalan dan telah memberikan pembelajaran penting bagi penguatan tata kelola, perencanaan, dan sinergi multipihak ke depannya. Berikut tantangan dan Pelajaran yang dapat dipetik untuk pelaksanaan tahun pertama:

Jenis	Tantangan Yang Dihadapi	Status Kondisi	Tindakan Yang Diambil	Dampak Terhadap Implementasi	Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dan Keterangan Lainnya
Program	Rendahnya Pemahaman tentang BRP REDD+ output 2	sedang	Menyusun profil singkat project	Meningkatnya pengetahuan tim teknis dan Masyarakat tentan	Perlunya workshop dan sosialisasi dalam menyebarkan

	di Tingkat tim teknis dan Masyarakat		BRP REDD+ output 2	BRP REDD+ output 2	informasi tentang BRP REDD+ output 2.
Program	Kegiatan proyek dimulai pada akhir tahun 2025, Dimana hampir semua pelaksana/OPD fokus pada penyelesaian kegiatan dan pelaporan (APBD).	Sedang	Penyesuaian kegiatan yang telah direncanakan	Beberapa kegiatan yang harusnya dilaksanakan pada awal proyek tidak dapat terlaksana.	Pengaturan dan penjadwalan kegiatan harus melihat dinamika OPD ditingkat provinsi, terutama pada akhir tahun fiscal.
Program	Realisasi bibit tanaman belum sesuai dengan jadwal perencanaan kegiatan.	Tinggi	Penyesuaian kegiatan yang telah direncanakan	Kegiatan yang harusnya dilaksanakan pada awal proyek tidak dapat terlaksana sesuai jadwal.	OPD harus lebih teliti dalam proses realisasi bibit tanaman dan tegas terhadap keterlambatan.
Pengadaan	Risiko Keterlambatan Proses	Rendah	Proses Lelang lebih awal	Perlu perubahan dokumen pengadaan	Pengadaan jasa dan barang sebaiknya lebih awal dilaksanakan, terkhususnya bibit pohon dan pendukung pertumbuhan.
Pengadaan	Kapasitas pengelola pengadaan	Kecil	Melakukan konsultasi	Meningkatnya kapasitas pengelola	Pedoman teknis pengadaan mampu menjadi acuan proses pengadaan
Safeguard REDD+	Provinsi Papua Barat Daya belum pernah membuat laporan safeguard dan mengisi SIS REDD, yang merupakan mandatori untuk semua provinsi di Indonesia.	Sedang	Melakukan proses penguatan pemahaman dan penyiapan tim safeguard di tingkat provinsi, serta pengumpulan data/informasi yang dibutuhkan.	Kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya pada intervensi safeguard REDD+ lebih membutuhkan waktu.	Pemahaman tentang safeguard sebagai komponen penting yang setara dengan kegiatan aksi.
Safeguard	Rendahnya keterlibatan perempuan	Sedang	Mendorong keterlibatan (utusan) perempuan disetiap kegiatan	Meningkatnya kehadiran perempuan pada pertemuan ditingkat desa.	Peran perempuan sangat signifikan disetiap kegiatan, namun terhalang administrasi
Safeguard	Ketersediaan dokumen MOV	Tinggi	Melakukan koordinasi rutin	Kelengkapan administrasi meningkat	Penentuan indicator keluaran setiap kegiatan dan penanggungjawab.
Safeguard Proyek	Masih lemahnya pemahaman pelaksana/OPD bawah	Kecil	Mendampingi dan mengingatkan pelaksana/OPD	Dampak terkait pemahaman ini tidak signifikan, mengingat proses	Perlu melakukan integrasi antara safeguard proyek ke dalam kegiatan-kegiatan OPD pelaksana.

	safeguard menjadi bagian rangkaian kegiatan dalam proyek.		dalam penerapan safeguard proyek.	intervensi dari Lemtara telah dilakukan seperti mendampingi dan mengingatkan kebutuhan kewajiban safeguard proyek.	
Keuangan	Ketaatan dan kepatuhan OPD pelaksana terkait SOP keuangan dan standar administrasi yang telah ditentukan masih ada yang belum sesuai, seperti pertanggung jawaban transportasi (nilai yang tidak sesuai dengan PMK dan bukti pertanggung jawaban).	Sedang	Menegakkan prosedur dan mengingatkan OPD terkait standar yang digunakan.	Keterlambatan (revisi) dalam proses pertanggung jawaban keuangan dari OPD pelaksana.	Adanya dinamika keuangan ini, dibutuhkan proses pengawalan dan ketelitian dari proses pertanggung jawaban. Dan pada tingkatan OPD, dibutuhkan PIC khusus yang bertanggung jawab terkait administrasi dan keuangan.
Keuangan	Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang cenderung "mendadak" sehingga proses penyiapan administrasi cenderung terburu buru dan sebagian kegiatan menggunakan mekanisme reimburse.	Sedang	Tetap memproses kegiatan dan mengawal proses pertanggung jawaban laporan keuangan	Keterlambatan (revisi) dalam proses pertanggung jawaban keuangan dari OPD pelaksana.	Adanya dinamika keuangan ini, dibutuhkan proses pengawalan dan ketelitian dari proses pertanggung jawaban. Dan pada tingkatan OPD, dibutuhkan PIC khusus yang bertanggung jawab terkait administrasi dan keuangan.

3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender

- Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai komitmen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDH. Sepanjang periode Oktober - Desember 2025, pelaksanaan program difokuskan pada penguatan penguatan tata kelola hutan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) dengan Yayasan Penabulu. Salah satu pencapaian utama dalam penguatan kelembagaan adalah pelaksanaan patroli pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara intensif di enam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta peningkatan kapasitas para pihak dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip ISP BPDH.
- Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. Mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung dan pemasangan banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025 tidak terdapat pengaduan resmi yang masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat diakses oleh Masyarakat maupun pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
- Keterlibatan gender tercatat sebanyak 746 orang dimana laki-laki 495 orang (66%) dan Perempuan 251 orang (34 %). Meskipun partisipasi masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi, kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan dan nondiskriminasi ditegaskan dalam seluruh ToR kegiatan dan pengadaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD, konsultasi publik, FGD, pelibatan kelompok perhutanan sosial, pemerintah desa, akademisi, dan mitra pembangunan sejak tahap perencanaan hingga validasi dokumen teknis. Proses ini memastikan transparansi, partisipasi bermakna, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat tapak.

Kegiatan	Mitra / Pemangku Kepentingan	Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pelaksanaan Program
1.1.1 Patroli Pengamanan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Satuan Polhut KPH ; 1.KPH Unit I Raja Ampat, 2.KPH Unit I Kota Sorong, 3.KPH Unit III Sorong, 4.KPH Unit IV Tambrau, 5.KPH Unit V Maybrat, 6.KPH Unit VI Sorong Selatan	Sebagai pelaksana kegiatan patroli pengamanan hutan
2.1.1.1 Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Kelompok Masyarakat ; 1.Kampung Koma Koma 2.Kampung Aus Tiwit, 3.Kampung Tumame, 4.Kampung Insas, 5.Kampung Isme, 6.Kampung Yumame	sebagai penerima manfaat dan pelaksana penanaman bibit pohon di Tingkat kampung.

2.1.1.2 Penanaman rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanandan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Vendor pengadaan ; 1.CV Boharar Forest Lestari, 2.CV Fun Maya, 3.CV Manuel Karya Utama, 4.CV Rae Saa, 5.CV Sami Jaya Bersatu, 6.CV Sorin Mandiri	Sebagai mitra pengadaan bibit pohon dan penanggungjawab penanaman bibit pohon.
2.1.1.3 Pelaksanaan monitoring lapangan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanandan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
2.1.3.1 Pengadaan bibit tanaman kehutanandan, MPTS dan Mangrove untuk penghijauan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanandan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
	CV Gerall Jaya	Sebagai mitra pengadaan bibit tanaman.
2.1.3.3 Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kab. Sorong	Anggota DPD RI	Sebagai senator utusan daerah Papua Barat Daya dan Narasumber
	Kementerian Lingkungan Hidup (direktorat IGRK)	Sebagai narasumber
	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanandan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Pemerintah Daerah ; 1.Kabupaten Maybrat 2.Kabupaten Sorong	Sebagai peserta sosialisasi
	Jamaat Gereja ; 1. GKI Sion Koma Koma (Maybrat) 2. GKI Klasis Malamoi (Kab. Sorong)	Sebagai peserta sosialisasi dan penerima manfaat
	Sinode di Tanah Papua	Sebagai narasumber sosialisasi
	Seksi wilayah III Balai PS Ambon	Sebagai narasumber
	KPH Maybart dan Sorong	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di Tingkat tapak.
	Kelompok Masyarakat	Sebagai peserta dan penerima manfaat.
3.1.1.1 Penyusunan dokumen Forest Reference level (FRL/FREL) termasuk Non Carbon Benefit (NCB)	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanandan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Perwakilan BAPERINDA PBD	Sebagai peserta kegiatan
	Kepala Seksi PSKL Wilayah VII Ambon-Papua	Sebagai peserta kegiatan
	Perwakilan Balai PPI	Sebagai peserta kegiatan
	Perwakilan BBKSDA	Sebagai peserta kegiatan
	Penabulu Foundation	Lembaga perantara
	Perwakilan Art Tress	Sebagai narasumber kegiatan
	Tim Liputan Pers lokal	Sebagai peserta dan pemberita kegiatan,
Monev Program RBP Papua Barat Daya	Gubernur Papua Barat Daya	Sebagai kepala pemerintahan daerah dan penanggung jawab kegiatan.

	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Asisten II Sekda Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai peserta
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara.

4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Pada tahun 2025, berbagai kegiatan program telah dilaksanakan dengan capaian yang bervariasi, meskipun sebagian besar output masih dalam proses. Pelaksanaan patroli di 6 lokasi berhasil dilakukan, namun pengadaan barang pendukung hanya tercapai sebagian, sehingga masih perlu penyelesaian lanjutan. Dalam hal sosialisasi dan dokumentasi, 5 kali sosialisasi beserta pengecekan lokasi penanaman serta penyusunan 8 dokumen rantek telah dilakukan, namun capaian output keseluruhan masih menunggu penyelesaian formal. Penanaman RHL tercatat seluas 85 Ha sebagai penyesuaian target, namun monitoring hasil penanaman baru dilaksanakan 1 kali, sehingga kegiatan pengawasan berkala perlu dilanjutkan. Pengadaan bibit penghijauan sebanyak 3.000 batang telah terlaksana, tetapi beberapa kegiatan terkait tertunda dan belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Kegiatan sosialisasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maybrat telah selesai, sedangkan kegiatan FGD dan penyusunan draft laporan FRL/FREL masih berada pada tahap awal dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa kegiatan lain, seperti pemasangan papan informasi, masih direncanakan untuk tahun berikutnya.

Hambatan lain muncul dalam tahap pelaksanaan, terutama pada proses menerjemahkan perencanaan dalam proposal yang masih bersifat umum menjadi kebutuhan implementasi yang rinci di tingkat tapak. Penentuan lokus kegiatan membutuhkan verifikasi, klarifikasi, dan pendalaman data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta sesuai kondisi lapangan. Konsekuensinya, proses berjalan lebih panjang karena harus melalui tahapan penetapan prioritas, pemenuhan persyaratan teknis, serta mekanisme persetujuan dari para pihak terkait sebelum kegiatan dapat dieksekusi. Pada saat yang sama, penerapan pendekatan partisipatif sebagai prasyarat penting sebelum penanaman memerlukan waktu yang lebih panjang untuk membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan dengan masyarakat.

Tindak lanjut untuk tahun berikutnya akan difokuskan pada penyelesaian seluruh kegiatan yang belum selesai, termasuk pengadaan barang pendukung untuk patroli, monitoring hasil penanaman RHL secara berkala, penanaman bibit penghijauan yang tertunda, penyusunan draft laporan FRL/FREL, dan pemasangan 53 papan informasi. Kegiatan lanjutan ini diharapkan dapat memastikan seluruh output tercapai sesuai target, meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, serta memperkuat koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung kelestarian hutan dan sumber daya alam.

Lampiran

Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program Provinsi Papua Barat Daya dalam Excel

[Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program_KP II_\(Papua Barat Daya\).xlsx](#)

Lampiran 2. Link Dokumentasi Pelaksanaan Program/Kegiatan (Link Google Drive)

Kode Kegiatan	Link Dokumen
1.1.1	https://drive.google.com/drive/folders/1f9joWW5gW-lvHB_xG2XnWkEzqpQXtdMm?usp=drive_link
2.1.1.1	https://drive.google.com/drive/folders/1M8_AM2Xn3HY5UripmHNCA93z_TsP3NRi?usp=drive_link
2.1.1.2	https://drive.google.com/drive/folders/1fxc3EcSQZzXPdRK80K0Uqyexx6pDJxj7?usp=drive_link
2.1.1.3	https://drive.google.com/drive/folders/17GSIxL7NAF_OIQW2WKD7HTWQsb-hrq8V?usp=drive_link
2.1.3.1	https://drive.google.com/drive/folders/1WltWz8RHRzhDpZExXNHt1wiJPit1pWYh?usp=drive_link
2.1.3.3	https://drive.google.com/drive/folders/12MtyJDMOysyDfZ_-4DAjyVYLIdChmO2?usp=drive_link
3.1.1.1	https://drive.google.com/drive/folders/1cv1i-h5BuFLXmOTTwFoUmORp-95c55iE?usp=drive_link
SP	https://drive.google.com/drive/folders/1fpNHdh7GkuIKvK_Cu7U4wJF0rbXwyYc2?usp=drive_link